

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari peran peningkatan mutu SDM atau pembentukan modal manusia. Pembentukan modal manusia adalah proses dan memperoleh peningkatan jumlah orang yang mempunyai keahlian pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara.

Manusia merupakan modal utama dalam membangun suatu negara menjadi lebih baik, pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju bukan saja diukur dari pendapatan domestik bruto, tetapi juga dari harapan hidup dan pendidikan masyarakatnya. Peran pemerintah juga penting dalam meningkatkan pembangunan manusia, melalui alokasi dana untuk masyarakat yang digunakan untuk peningkatan bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dibuat dan dipopulerkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) sejak tahun 1996 dalam seri laporan tahunan yang diberi judul "*Human Development Report*" Indeks ini disusun sebagai salah satu dari indikator alternatif untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara selain pendapatan nasional perkapita. IPM adalah indikator menggunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari

hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM adalah suatu indeks komposisi yang didasarkan pada tiga indikator, yakni kesehatan, pendidikan yang dicapai dan standar kehidupan. Indikator kesehatan diukur dengan usia panjang atau tingkat harapan hidup (*life expectancy*), indikator pendidikan diukur dengan rata-rata melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*). Sementara itu standar kehidupan diukur dengan pendapatan riil yang disesuaikan, yaitu kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Akan tetapi ada tahun 2010 UNDP menyempurnakan metode lama dengan metode baru, dengan mengganti salah satu indikator yaitu angka melek huruf diganti dengan angka harapan lama sekolah. Alasan mengapa angka melek huruf diganti dengan angka harapan lama sekolah adalah bahwa angka melek huruf sudah tidak efektif lagi karena angka tersebut sudah besar diseluruh Indonesia, sehingga tidak efektif lagi jika masih menggunakan angka melek huruf. UNDP mendefinisikan IPM sebagai “*a process of enlarging people’s choice*” atau suatu proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia masih menjadi masalah utama di Indonesia. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang masih rendah sebagaimana ditunjukkan oleh indeks pembangunan manusia yang menempati urutan ke 111 dari 189 Negara dan berada di posisi ke 6 dari 10 negara ASEAN pada tahun 2019.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2019 IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 65,23% angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah 64,39 %. Kota Kupang yang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Nusa Tenggara

Timur yang memiliki angka indeks pembangunan menengah. Berikut angka Indeks Pembangunan Manusia di lihat dari tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kupang tahun 2012-2019 (dalam persen)

Tahun	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Riil Perkapita	IPM
2012	67,90	15,50	11,39	12,589	76,38
2013	68,09	15,51	11,40	12,651	77,24
2014	68,14	15,55	11,41	12,762	77,58
2015	68,34	15,75	11,43	12,885	77,95
2016	68,46	15,76	11,44	12,986	78,14
2017	68,58	15,77	11,45	13,028	78,25
2018	68,90	16,08	11,46	13,199	78,84
2019	69,37	16,24	11,47	13,592	79,55

Sumber: BPS Kota Kupang, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kota Kupang mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya, yang paling terkecil pada tahun 2012 sebesar 76,38 % dan terbesar pada tahun 2019 sebesar 79,55 %.

IPM digunakan untuk melakukan pemeringkatan terhadap kinerja pembangunan suatu wilayah di dunia. Menurut BPS (2017) UNDP membedakan tingkat IPM berdasarkan tiga klasifikasi yaitu :

- a. Kelompok wilayah dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah (*low human development*), bila memiliki nilai IPM kurang dari 50 %.
- b. Kelompok wilayah dengan tingkat pembangunan manusia menengah (*medium human development*), bila memiliki nilai IPM 50 % samapai 79,99 %.
- c. Kelompok wilayah dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi (*high human development*), bila memiliki nilai IPM 80 % ke atas..

Maka dapat disimpulkan pada tabel 1.1 bahwa indeks pembangunan manusia di Kota Kupang tergolong dalam tingkatan *medium human development* atau pembangunan manusia yang tergolong sedang yakni kisaran antara 50 % sampai 79 %.

Pembangunan manusia tidak terlepas dari peran pemerintah dalam pembangunan, karena manusia merupakan modal utama dalam pembangunan suatu daerah. Kebijakan alokasi APBD sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berlakunya desentralisasi fiskal, hal ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat membangun daerahnya masing-masing secara optimal.

Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditunjukkan pada pembangunan manusia yakni sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang merupakan sektor yang sangat vital dalam membentuk modal manusia yang akan berdampak pada pembangunan suatu daerah. Biaya tersebut didanai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu sektor menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada sektor tersebut. Untuk mengetahui perkembangan alokasi anggaran belanja pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2  
Alokasi Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Kota  
Kupang (dalam rupiah) tahun 2012-2019

<b>Tahun</b>	<b>Sektor Pendidikan</b>	<b>Sektor Kesehatan</b>	<b>Sektor Ekonomi</b>
2012	340.221.432.113	63.113.334.213	49.520.456.099
2013	380.008.814.856	71.330.886.592	49.624.996.004
2014	430.722.214.715	67.660.265.812	59.086.887.182
2015	468.494.410.172	70.783.591.225	60.466.315.604
2016	486.275.626.081	91.228.909.472	60.836.813.946
2017	337.409.506.177	101.289.037.105	54.238.321.200
2018	333.564.986.346	112.315.197.488	54.337.099.417
2019	359.346.449.396	185.090.961.593	55.209.179.710

*Sumber : Bappeda Kota Kupang, 2020*

Tabel 1.2 memperlihatkan perkembangan alokasi belanja pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi di kota Kupang tahun 2012-2019. Alokasi belanja pemerintah Kota Kupang sektor pendidikan mengalami fluktuasi dari tahun 2012-2019. Pada sektor kesehatan meningkat dari tahun 2012-2019 sedangkan pada sektor ekonomi mengalami fluktuasi dari tahun 2012-2019.

Peningkatan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi Kota Kupang merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia. Hal ini diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan Kota Kupang.

Anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008.

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan, Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UUD No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan

minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD diluar gaji.

Alokasi anggaran pada pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi diharapkan mampu membentuk modal manusia yang merupakan tonggak penting dalam pembangunan suatu daerah.

Alokasi belanja pemerintah sektor pendidikan pada tahun 2012 berjumlah Rp. 340.221.432.113 kemudian meningkat pada tahun 2013-2016. Tahun 2013 berjumlah Rp 380.008.814.856, tahun 2014 berjumlah Rp. 430.722.214.715, tahun 2015 berjumlah Rp. 468.494.410.172, tahun 2016 berjumlah Rp. 486.275.626.081 kemudian menurun kembali pada tahun 2017-2018. Tahun 2017 berjumlah Rp. 337.409.506.117 dan tahun 2018 berjumlah Rp. 333.564.986.346 dan meningkat lagi pada tahun 2019 berjumlah Rp. 359.346.449.396. Belanja pemerintah pada sektor pendidikan paling terbesar pada tahun 2016 dan yang terkecil pada tahun 2018. Pada sektor kesehatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya adapun yang terkecil pada tahun 2012 berjumlah Rp 63.113.334.213, yang paling terbesar pada tahun 2019 yang berjumlah Rp. 185.090.961.593 angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp. 111.315.197.447. Sedangkan pada sektor ekonomi juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya, yang paling terbesar pada tahun 2016 berjumlah Rp. 60.836.813.946 dan yang terkecil pada tahun 2012 berjumlah Rp. 49.520.456.009.

Akan tetapi dilihat dari indeks pembangunan manusianya tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari belanja pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi tersebut diharapkan mampu meningkatkan indeks

pembangunan manusia, mengingat tingkat IPM di Indonesia yang masih menempati posisi 111 dari 189 Negara di seluruh dunia menurut UNDP (*United Nation Development Programme*). Menurut data BPS Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur indeks pembangunan manusia menduduki posisi 29 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk Kota Kupang sendiri berada pada posisi ke 40 dari 514 Kabupaten/ Kota di Indonesia.

Dari uraian diatas maka penting untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kota Kupang. Oleh karena itu penulis memilih untuk mengangkat judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Kupang”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi secara parsial berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Kupang tahun 2012-2019 ?
2. Apakah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Kupang tahun 2012-2019 ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan**

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Kupang tahun 2012-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Kupang tahun 2012-2019.

### **1.3.2 Manfaat**

1. Bagi peneliti dan pembaca, untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh belanja pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia tahun 2012-2019.
2. Bagi pemerintah agar bisa menjadi bahan untuk evaluasi belanja pemerintah khususnya sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi terhadap IPM tersebut.
3. Dapat menambah literatur ilmiah mengenai kajian dan penelitian tentang pembangunan manusia.
4. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada masyarakat yang ingin melakukan penelitian lanjutan tentang indeks pembangunan manusia.